

Dinsos Siapkan Logistik Antisipasi Bencana Susulan



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Jumat,14/06/2024

SAMARINDA, TRIBUN – Sampai saat ini Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) masih dalam masa pemulihan pasca diterjang banjir setinggi 3 meter sejak Senin (13/5) lalu. Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kalimantan Timur, Achmad Rasyidi mengatakan, saat ini penduduk Kabupaten Mahulu masih disibukan dengan pembersihan lumpur yang memenuhi setiap rumah.

Dinsos Kaltim juga telah menutup posko darurat dan kesehatan sebab seluruh kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, dan kantor pelayanan yang juga sempat terendam kini sudah beroperasi kembali. “Tim dan mobil penyaluran bansos kami juga sudah kembali sejak Selasa (11/6) kemarin,” bebernya. Terkait kebutuhan dasar, Dinsos Kaltim telah memastikan seluruh masyarakat Mahulu telah mendapatkan bantuan logistik dan sandang. “Ada juga bantuan dari BUMN untuk perabotan dan pakaian. Jadi saat ini memang masa pembersihan saja,” bebernya.

Sementara untuk Kabupaten Kutai Barat, Rasyidi mengungkapkan tidak terjadi luapan air setinggi di Mahakam Ulu. Kiriman air hanya sempat membanjiri Kecamatan Long Iram, Kecamatan Tering, dan Desa Melak. “Dan permukiman yang terdampak hanya di bantaran sungai saja,” jelasnya.

Meski aktivitas masyarakat sudah kembali normal, namun Dinsos Kaltim sudah menyiapkan antisipasi apabila terjadi bencana susulan mengingat saat ini cukup sulit memprediksi cuaca. “Bantuan logistik selalu siap untuk antisipasi kebencanaan di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Kaltim,” pungkasnya.

Sebelumnya, 4.500 paket bantuan sembako untuk warga terdampak banjir di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Provinsi Kalimantan Timur telah berangkat, Minggu (26/5) siang. Ditambah 1.500 paket sebelumnya, maka genap sudah 6000 paket logistik

dikirim untuk warga Mahulu yang disalurkan oleh Pemprov Kaltim melalui Dinas Sosial.

4.500 paket yang berangkat tersebut terdiri dari kebutuhan pokok. Ada juga tambahan 300 paket berisi matras, bantal, perabotan dapur dan terpal yang turut dikirimkan.

“4.500 paket tersebut bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dengan total anggaran Rp1.988.310.000 (1,9 miliar lebih),” sebut Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim Andi Muhammad Ishak melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Achmad Rasyidi saat dikonfirmasi Tribunkaltim.co.

Ia menjelaskan paket yang kini dalam perjalanan tersebut akan diturunkan di posko bantuan di Mahulu yang telah mereka dirikan. “Nanti dari posko baru disalurkan ke rumah-rumah korban terdampak (banjir) sesuai data yang ada,” jelasnya.

Selain Mahulu, Dinsos Kaltim juga sudah menyiapkan bantuan logistik untuk warga terdampak banjir di Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Rasyidi menyebutkan saat ini Dinsos Kaltim masih memiliki 2.500 stok paket logistik di gudang.

Namun pihaknya belum mengetahui berapa paket yang harus dikirimkan sebab masih menunggu proses pendataan dari Pemerintah Kabupaten Kubar. “Karena kita tidak mau bantuannya nanti malah mubazir. Jadi kami menunggu berapa data pasti yang membutuhkan bantuan ini,” pungkas Rasyidi. (ave)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Dinsos Siapkan Logistik Antisipasi Bencana Susulan, 14/06/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 6 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diatur bahwa tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
 - c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - d. pemulihan kondisi dari dampak bencana; dan
 - e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai.
2. Dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Perda 2/2013) diatur sebagai berikut:
 - (1) Pada saat keadaan darurat bencana, badan penanggulangan bencana daerah berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.

- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.
3. Dalam Pasal 35 Perda 2/2013 diatur sebagai berikut:
- (1) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
 - (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik ke lokasi bencana harus sesuai dengan kebutuhan.